

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Aprilianti dan Kasmawanti, 2022, *Hukum Adat Di Indonesia*, Pusaka Media.

Aria, Zurnetti, 2020, *Kedudukan Hukum Pidana Adat dalam Penegakan Hukum dan Relevansinya dengan Pembaharuan Hukum Pidana Nasional*, Rajawali Pers, Depok.

Bagindo, dkk., 2014, *Adat Salingka Nagari*, Nagari Koto Panjang.

Bambang, Sunggono, 2012, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Barda Nawawi, Arief, 2016, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Prena Media Group, Jakarta.

Bushar, Muhammad, 2013, *Pokok-Pokok Hukum Adat*, Balai Pustaka, Jakarta.

Frans, Maramis, 2016, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, PT. Sangir Multi Usaha.

Helmy, Panuh, 2012, *Peranan Kerapatan Adat Nagari Dalam Proses Pendaftaran Tanah Adat Di Sumatera Barat*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Idrus Hakimy, Dt. Rajo Penghulu, 1984, *Pokok Pokok Pengetahuan Adat Alam Minangkabau*, Remadja Karya CV, Bandung.

Hilman, Hadikusuma, 1989, *Hukum Pidana Adat*, Alumni, Bandung.

2003, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, Mandar Maju, Bandung.

I Made Widnyana, 2013, *Hukum Pidana Adat Dalam Pembaharuan Hukum Pidana*, PT Fikahati Aneska, Jakarta.

Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.

Rachmat, Ihya, 2023, *Hukum Adat*, LPPM Unsuri Surabaya.

Sigit Sapto, Nugroho, 2016, *Pengantar Hukum Adat Indonesia*, Pustaka Iltizam.

Simons, 1992, *Kitab Pelajaran Hukum Pidana* diterjemahkan oleh P.A.F Lamintang, Pioner Jaya, Bandung.

Sri, Warjiyati, 2020, *Ilmu Hukum Adat*, Deepublish, Sleman.

Tofik Yanuar, Chandra, 2022, *Hukum Pidana*, PT Sangir Multi Usaha.

Yulia, 2016, *Buku Ajar Hukum Adat*, Unimal Press, Lhokseumawe.

Wendra, Yunaldi, 2021, *Nagari dan Negara: Perspektif Otentik Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dalam Ketatanegaraan Indonesia*, JBS Publisher, Yogyakarta.

B. Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nomor 1 Tahun 1946.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Nomor 8 Tahun 1981.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari.

C. Jurnal

Allya, Putri Yuliyani, 2023, "Peran Hukum Adat Dan Perlindungan Hukum Adat Di Indonesia", *Jurnal Hukum Dan HAM Wara Sains*, Vol. 2, No. 09, hlm. 860–865.

Asturi, Yolanda, et al., 2024, "Penyelesaian Konflik Tanah Pusako Oleh Lembaga Kerapatan Adat Nagari", *Jurnal Ideologi Dan Konstitusi*, Vol. 4, No. 2, hlm. 170–175.

- Darmini, Roza, et al., 2022, "Peran Serta Lembaga Kerapatan Adat Nagari Dalam Mewujudkan Nagari Madani Di Kabupaten Agam", *Uneslaw Review*, Vol. 5, No. 1, hlm. 66–73.
- Elwi, Danil, 2012, "Konstitusionalitas Penerapan Hukum Adat Dalam Penyelesaian Perkara Pidana", *Jurnal Konstitusi*, Vol. 9, No. 3, hlm. 121–596.
- Fauzia, dan Afrizal, 2023, "Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Kerapatan Adat Nagari Dalam Pemerintahan Otonom di Nagari Tigo Jangko, Kecamatan Lintau Buo, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat". *Jurnal Ekonomi Dan Ilmu Sosial (JEIS)*, Vol. 2, No. 02, hlm. 249–257.
- Hadri Yanti, Azizah, Linda Rachmainy, dan Hazar Kusmayanti, 2022, "Tahapan Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat Di Nagari Tungka Kabupaten 50 Kota Melalui Lembaga KAN Berdasarkan Adat Salingka Nagari", *COMSERVA Indonesian Journal of Community Services and Development*, Vol. 2, No. 4, hlm. 417–425.
- Hermanto, Indra Prayoga, dan Arinto Nurcahyono, 2022, "Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Residivis Tindak Pidana Pencurian Sepeda Motor di Kabupaten Banggai", *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, hlm. 89–94.
- Julisa Aprilia, Kaluku, 2014, "Penggunaan Hukum Adat Bajo Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Anak Pelaku Tindak Pidana Kesusilaan", *Arena Hukum*, Vol. 7, hlm. 103.
- Murniwati, 2023, "Eksistensi Peradilan Adat Nagari dalam Penyelesaian Sengketa Hukum Adat di Sumatera Barat." *Swara Justisia*, Vol. 18, No. 1, hlm. 22–35. <https://ejournal.unp.ac.id/index.php/swarajustisia/article/view/12345>.
- Nur Azizah, Dadang Hikma Purnama, dan Yusnaini, 2023, "Peran Kerapatan Adat Nagari (KAN) Dalam Menyelesaikan Perkara Sako Dan Pusako Di Nagari Sulit Air Kecamatan X Koto Diatas Kabupaten Solok Sumatera Barat", *Jurnal Empirika*, Vol. 8, No. 1, hlm. 40–57.
- Nurlinda, Yenti, Devan, dan Saddana Putra, 2022, "Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian Ikan Di Lubuak Larangan Menurut Hukum Adat Di Nagari Pulasan Kec. Tanjung Gadang Kab. Sijunjung", *Jurnal Normative*, Vol. 10, No. 02, hlm. 45–53.
- Penta, Trihamdi, Edi Haskar, dan Nessa Fajriyana Farda, 2023, "Pelaksanaan Kewenangan Kerapatan Adat Nagari Sebagai Lembaga Peradilan Di Nagari Duku Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan", *Menara Ilmu*, Vol. XVII, No. 01, hlm. 107–115.
- Yenita, Yatim, 2023, "Peran Kerapatan Adat Nagari Kuranji Dalam Membina Perilaku Remaja Di Kelurahan Kuranji", *JIM: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah*, Vol. 8, No. 2, hlm. 640–647. <https://doi.org/10.24815/jimps.v8i2.24755>.

Yoserwan, 2023, "Eksistensi Hukum Pidana Adat Dalam Hukum Pidana Nasional Setelah Pengesahan KUHP Baru," *UNES Law Review*, Vol. 5, No. 04, hlm. 2002.

D. Website

Aprilianti dan Kasmawanti, 2022, *Hukum Adat Di Indonesia*, <http://repository.lppm.unila.ac.id/id/eprint/47458>, dikunjungi pada tanggal 13 Maret 2025, pukul 21.39 WIB.

Ilmu Kita, 2016, "Pengertian Tindak Pidana dan Jenis – Jenis Delik", <https://www.google.co.id/amp/s/ilmukita683.wordpress.com/2016/11/18/pengertian-tindak-pidana-dan-jenis-jenis-delik/amp/>, dikunjungi pada tanggal 1 April 2025, Pukul 21.39 WIB.

